

MENGGAGAS NILAI – NILAI MULTIKULTURALISME DALAM MENGATASI PERMASALAHAN DUNIA PENDIDIKAN

Oleh: Anita Trisiana

Abstract: To resolve current issues, education has to be understood as societal responsibility, encompassing governments, families, communities and organizations, and multicultural education. It requires commitment and participation of all. Thus all element of communities should be regarded as " educational instruments. Therefore , the alternative education would be an important agenda in order to complete the selection of the education that have already available, even in certain limited.

Kata Kunci : Nilai - Nilai Multikulturalisme, Dunia pendidikan

PENDAHULUAN

Pada era reformasi ini, tantangan yang dirasakan selubung dengan adanya persaingan global, sangat berpengaruh terhadap dunia pendidikan. Semua lembaga pendidikan yang bernilai tentunya dapat menghasilkan sumber daya apaturne yang unggul, yaitu apaturne yang cerdas dan berprestasi baik, yang meliputi kecerdasan intelektual, sosioemosional, maupun spiritual. Apaturne yang seperti itulah yang diharapkan dapat berguna dalam kondisi biskerasi.

Mengupadkan kenyataan yang tak bisa ditolak bahwa negara-bangsa Indonesia terdiri dari berbagai kelompok etnis, budaya, agama dan lain-lain sehingga negara-bangsa Indonesia secara sederhana dapat disebut sebagai masyarakat "multikultural". Tetapi pada pihak lain, realitas "multikultural" tersebut berhadapan dengan kebutuhan mendesak untuk merekonstruksi kembali "kebudayaan nasional Indonesia" yang dapat menjadi "integrating force" yang mengikat seluruh keragaman etnis dan budaya tersebut.

Dalam konteks itu, maka diperlihatkan suatu taratan nilai yang mampu merubah, membenahi segala persoalan yang ada. Tujuan ini ingin menunjukkan bahwa upaya menyelesaikan permasalahan pendidikan Indonesia di tengah masyarakat yang multikultural hanya mungkin dapat terwujud bila: (1) Keberadaan masyarakat merupakan laboratorium dan sumber makro yang potensial untuk memperbaya pelaksanaan proses pendidikan; (2) Pendidikan multikultural adalah suatu pendekatan progresif untuk melakukan transformasi

pendidikan yang secara menyeluruh membongkar kekuasaan, kegagalan dan praktik-praktik diskriminatif dalam proses dan (3) Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk dapat mewujudkan inovasi dalam dunia pendidikan.

Konsep Masyarakat Multikultural

Multikulturalisme secara etimologi mulai digunakan pada tahun 1950-an di Kanada. Menurut Long Oxford Dictionary istilah "multiculturalism" merupakan derivasi dari kata "multicultural". Kata ini menyiratkan kalimat dari suatu kabar Kanada, Montreal Times yang menggambarkan masyarakat Montreal sebagai masyarakat "multicultural dan multi-lingual". (www.PendidikanNetwork.com/Artikel)

Istilah multikultural kemudian semakin mengristal dalam pandangan yang lebih ekstrem, yaitu multikulturalisme. Dengan adanya tambahan "isme" dari akar katanya (multikultural), istilah ini ternyata semakin tidak mudah dipahami. Menurut Bethany Bryson dalam Rohmat Mulyana (2006), seorang profesor dari Universitas Virginia, mencoba memecahkan kompleksitas makna kata tersebut. Ia mewawancarai sejumlah profesor berkaliher dalam urusan multikultural yang akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa makna istilah tersebut ternyata masih kabur dan perlu diperjelaskan.

Meski begitu, ada dua hal yang menarik dicermati dari hasil riset Bryson berkenaan dengan ditemukannya kecenderungan utama dalam memahami

adalah multikulturalisme. Multikulturalisme sering dipersepsi sebagai politik pengajaran dan nilai keagamaan pada tatanan masyarakat global. Dua istilah tersebut sebenarnya terkait erat dengan dunia pendidikan yang satu dengan yang lainnya tidak saling mengesampingkan (*mutually exclusive*), bahkan dapat dikatakan ibarat dua sisi uang yang berbeda.

Multikulturalisme bukan hanya sebuah wacana tetapi sebuah ideologi yang harus diperjuangkan, karena dibutuhkan sebagai landasan bagi tegaknya demokrasi, HAM, dan kesejahteraan hidup masyarakatnya. Multikulturalisme bukan sebuah ideologi yang berdiri sendiri terpisah dari ideologi-ideologi lainnya, dan multikulturalisme membutuhkan seperangkat konsep-konsep yang merupakan bangunan konsep-konsep untuk dijadikan acuan bagi mereduksinya dan mengembangkannya dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk dapat memahami multikulturalisme diperlukan landasan pengetahuan yang berupa bangunan konsep-konsep yang relevan dengan dan mendukung keberadaan serta berfungsinya multikulturalisme dalam kehidupan manusia. Bangunan konsep-konsep ini harus dikomunikasikan di antara para ahli yang mempunyai perhatian ilmiah yang sama tentang multikulturalisme sehingga terdapat kesamaan pemahaman dan saling mendukung dalam memperjuangkan ideologi ini. Berbagai konsep yang relevan dengan multikulturalisme antara lain adalah, demokrasi, keadilan dan hukum, nilai-nilai budaya dan etos, kebersamaan dalam perbedaan yang seadil-adilnya, sukubangsa, kemakmuran, kebudayaan sukubangsa, keyakinan keagamaan, ungkapan-ungkapan budaya, domain privat dan publik, HAM, hak budaya komuniti, dan konsep-konsep lainnya yang relevan (Fay 1996, Rex 1985, Supriatno 2002).

Model multikulturalisme ini sebenarnya telah digunakan sebagai acuan oleh para pendiri bangsa Indonesia dalam mendesain apa yang dimaksudkan sebagai kebudayaan bangsa, sebagaimana yang terungkap dalam penjelasan Pasal 32 UUD 1945, yang berbunyi: "kebudayaan bangsa (Indonesia) adalah pemecah-pemecah kebudayaan di daerah" (Supriatno, 1999).

Nilai – Nilai Multikulturalisme

Menurut Tilzer (2002), pendidikan multikultural berasal dari berkembangnya gagasan dan kesadaran tentang "interkulturalisme" awal penguasa dunia II. Kemunculan gagasan dan kesadaran "interkulturalisme" ini selain terkait dengan perkembangan politik internasional menyangkut HAM, kemerdekaan dari kolonialisme, dan diskriminasi rasial dan lain-lain, juga karena meningkatnya pluralitas di negara-negara Barat sendiri sebagai akibat dari peningkatan migrasi dari negara-negara baru merdeka ke Amerika dan Eropa.

Mengenai fokus pendidikan multikultural, Tilzer (2002) mengungkapkan bahwa dalam program pendidikan multikultural, fokus tidak lagi diarahkan secara-mata kepada kelompok rasial, agama dan kultural domain atau mainstream. Fokus seperti ini pernah menjadi tekanan pada pendidikan interkultural yang menekankan peningkatan pemahaman dan toleransi individu-individu yang berasal dari kelompok minoritas terhadap budaya mainstream yang dominan, yang pada akhirnya menyebabkan orang-orang dari kelompok minoritas terintegrasi ke dalam masyarakat mainstream. Pendidikan multikultural sebenarnya merupakan sikap "peduli" dan mau mengerti (*difference*), atau "politics of recognition" politik pengakuan terhadap orang-orang dari kelompok minoritas.

Istilah "pendidikan multikultural" dapat digunakan baik pada tingkat deskriptif dan normatif, yang menggarisbawakan isu-isu dan masalah-masalah pendidikan yang berkaitan dengan masyarakat multikultural. Lebih jauh ia juga mencakup pengertian tentang pertimbangan terhadap kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi pendidikan dalam masyarakat multikultural. Dalam konteks deskriptif ini, maka kurikulum pendidikan multikultural mestilah mencakup subjek-subjek seperti: toleransi; tema-tema tentang perbedaan etno-kultural dan agama; budaya diskriminasi; penyelesaian konflik dan mediasi; HAM; demokratis dan pluralitas; kemanusiaan universal dan subjek-subjek lain yang relevan.

Dalam konteks normatif, belajar dari

model-model pendidikan multikultural yang pernah ada dan sedang dikembangkan oleh negara-negara maju, dikenal lima pendekatan, yaitu: pertama, pendidikan mengenai perbedaan-perbedaan kebudayaan atau multikulturalisme. Kedua, pendidikan mengenai perbedaan-perbedaan kebudayaan atau pemahaman kebudayaan. Ketiga, pendidikan bagi pluralisme kebudayaan. Keempat pendidikan *dwi-budaya*. Kelima, pendidikan multikultural sebagai pengalaman moral manusia.

Di Indonesia, pendidikan multikultural relatif baru dikenal sebagai suatu pendekatan yang dianggap lebih sesuai bagi masyarakat Indonesia yang heterogen, terlebih pada masa otonomi dan desentralisasi yang harus dilakukan. Pendidikan multikultural yang dikembangkan di Indonesia sejalan perkembangan demokrasi yang dijalankan sebagai *counter* terhadap kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Apabila hal itu dilaksanakan dengan tidak berhati-hati justru akan mengancamkan kita ke dalam pepecahan nasional.

Berikut ini beberapa model yang dapat digunakan dalam pendidikan multikultural, yaitu:

1. Penambahan informasi tentang keragaman budaya merupakan model pendidikan multikultural yang mencakup revisi atau materi pembelajaran, termasuk revisi buku-buku teks. Terlepas dari kritik atas penerapannya di beberapa tempat, revisi pembelajaran seperti di Amerika Serikat merupakan strategi yang dianggap paling penting dalam reformasi pendidikan dan kurikulum. Fondasi kembali sejarah Amerika dari perspektif yang lebih beragam merupakan suatu agenda pendidikan yang diperjuangkan intelektual, aktivis dan praktisi pendidikan. Di Jepang aktivis kemanusiaan melakukan advokasi serius untuk merevisi buku sejarah, terutama yang menyangkut peran Jepang pada perang Jema II di Asia. Walaupun belum diterima, usaha ini sudah mulai membuka mata sebagian masyarakat akan pentingnya perspektif baru tentang perang, agar tragedi kemanusiaan tidak terulang kembali. Sedangkan di Indonesia masih

diperlukan usaha yang panjang dalam merevisi buku-buku teks agar mengakomodasi kontribusi dan partisipasi yang lebih inklusif bagi warga dari berbagai latarbelakang dalam penyusunan Indonesia. Indonesia juga memerlukan pula materi pembelajaran yang bisa mengatasi "derahan sejarah" diberbagai wilayah.

2. Model lainnya adalah pendidikan multikultural tidak sekedar merevisi materi pembelajaran tetapi melakukan reformasi dalam sistem pembelajaran itu sendiri. *Affirmative action* dalam seleksi siswa sampai rekrutmen pengajar di Amerika adalah salah satu strategi untuk membantu perbaikan ketimpangan struktural terhadap kelompok minoritas. Contoh yang lain adalah model "sekolah perbatasan" *Interkultural Media di Medan* yang memfasilitasi interaksi siswa dari berbagai latar belakang budaya dan menyusun program untuk anak-anak lintas-kelompok. Di Amerika Serikat berurusan dengan masalahnya yaitu multikulturalisme, dilakukan berbagai tekaknya di sekolah-sekolah maupun di masyarakat luas untuk meningkatkan kepekaan sosial, toleransi dan mengurangi prasangka antar kelompok.

Untuk mewujudkan model-model tersebut, pendidikan multikultural di Indonesia perlu memotivasi kombinasi model yang ada, agar seperti yang diajukan Goraki, pendidikan multikultural dapat mencakup tiga hal jenis transformasi, yakni: (1) transformasi diri; (2) transformasi sekolah dan proses belajar mengajar, dan (3) transformasi masyarakat. (www.pendidikanerwerk/artikel)

Menyusun pendidikan multikultural dalam tuturan masyarakat yang penuh permasalahan antar kelompok mengandung tantangan yang tidak ringan. Pendidikan multikultural tidak berarti sebatas "menyayakan keragaman" belaka. Apalagi jika tuturan masyarakat yang ada masih penuh diskriminasi dan bersifat rasial. Dapat pula dipertanyakan apakah mungkin manusia siswa yang dalam kehidupan sehari-hari mengalami diskriminasi atau perlakuan kurang sama kebudayaannya atau

perbedaannya dari budaya yang dominan tersebut? Dalam kondisi demikian pendidikan multikultural lebih tepat diarahkan sebagai advokasi untuk menciptakan masyarakat yang toleran dan bebas toleransi.

Ada beberapa pendekatan dalam proses pendidikan multikultural, yaitu: *Pertama*, tidak lagi terbawa pada menyamakan pandangan pendidikan (education) dengan persekolahan (schooling) atau pendidikan multikultural dengan program-program sekolah formal. Pandangan yang lebih luas mengenai pendidikan sebagai transmisi kebudayaan membebaskan pendidik dari asumsi bahwa tanggung jawab primer mengembangkan kompetensi kebudayaan di kalangan anak didik semata-mata berada di tangan mereka dan justru semakin banyak pihak yang bertanggung jawab karena program-program sekolah seluruhnya terkait dengan pembelajaran informal di luar sekolah.

Kedua, menghindari pandangan yang menyamakan kebudayaan-kebudayaan dengan kelompok etnik adalah sama. Artinya, tidak perlu lagi mengasosiasikan kebudayaan semata-mata dengan kelompok-kelompok etnik sebagaimana yang terjadi selama ini, secara tradisional, para pendidik mengasosiasikan kebudayaan hanya dengan kelompok-kelompok sosial yang relatif self sufficient, ketimbang dengan sejumlah orang yang secara terus menerus dan berulang-ulang terlibat satu sama lain dalam satu atau lebih kegiatan. Dalam konteks pendidikan multikultural, pendekatan ini diharapkan dapat mengilhami para penyusun program-program pendidikan multikultural untuk melepaskan kecenderungan memandang anak didik secara stereotip menurut identitas etnik mereka dan akan meningkatkan eksplorasi pemahaman yang lebih besar mengenai kesamaan dan perbedaan di kalangan anak didik dari berbagai kelompok etnik.

Ketiga, karena pengembangan kompetensi dalam suatu "kebudayaan baru" biasanya membutuhkan inisiatif dengan orang-orang yang sudah

memiliki kompetensi, bahkan dapat dibuat lebih jelas bahwa upaya-upaya untuk mendukung sekolah-sekolah yang terpinah secara etnik adalah antisipasi terhadap tujuan pendidikan multikultural. Memperubahkannya dari mengedukasi solidaritas kelompok adalah menghambat realisasinya ke dalam kebudayaan baru. Pendidikan bagi pluralisme budaya dan pendidikan multikultural tidak dapat diartikan secara logis.

Keempat, pendidikan multikultural meningkatkan kompetensi dalam beberapa kebudayaan. Kebudayaan mana yang akan diadopsi ditentukan oleh situasi.

Kelima, kemungkinan bahwa pendidikan (baik dalam maupun luar sekolah) meningkatkan kesadaran tentang kompetensi dalam beberapa kebudayaan. Kesadaran seperti ini kemudian akan menjauhkan kita dari konsep dua budaya atau dikotomi antara pribumi dan non-pribumi. Dikotomi semacam ini bersifat membatasi individu untuk sepenuhnya mengapresiasi diversitas kebudayaan. Pendekatan ini meningkatkan kesadaran akan multikulturalisme sebagai pengalaman normal manusia. Kesadaran ini mengandung makna bahwa pendidikan multikultural berpotensi untuk menghindari dikotomi dan mengembangkan apresiasi yang lebih baik melampaui kompetensi kebudayaan yang ada pada diri anak didik. (Saparian, 2001)

Upaya-Upaya Yang Dapat Dilakukan

Sebaiknya Depdiknas R.I. mengadopsi nilai - nilai pendidikan multikulturalisme untuk dibelajarkan dalam pendidikan sekolah, dari tingkat SD sampai dengan tingkat SLTA. Multikulturalisme sebaiknya termasuk dalam kurikulum sekolah, dan pelaksanaannya dapat dilakukan sebagai pelajaran ekstra-kurikuler atau menjadi bagian dari kurikulum sekolah (khususnya untuk daerah-daerah bekas konflik berdarah antar suku/bangsa, seperti di Poso, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan berbagai tempat lainnya). Dalam sebuah diskusi dengan tokoh-tokoh Madura, Dayak, dan Melayu di Singkawang baru-baru ini,

mereka itu semuanya menyetujui dan mendukung ide tentang diselenggarakannya pelajaran multikulturalisme di sekolah-sekolah dalam upaya mencegah terulangnya kembali di masa yang akan datang konflik berdarah antar suku/bangsa yang pernah mereka alami baru-baru ini (lihat Supriatna 2002)

Selain itu perlu adanya upaya pengkajian untuk memilih paradigma pendidikan yang mampu menjawab kebutuhan-kebutuhan substansial pendidikan dalam berbagai dimensi dan konteks keilmuan untuk menjawab tantangan kekinian dalam kehidupan global. Di samping juga diperlukan perubahan orientasi pendidikan, yang: (1) dari sentralistik ke desentralistik; (2) dari sisi pendekatan parsial-sektoral ke holistik-intersektoral; (3) dari penyibanggaan KBM *teacher centered* ke *student centered*; dan (4) dari mutu pendidikan yang berorientasi pada wawasan lokal-nasional ke mutu pendidikan yang bertaraf internasional.

Implikasi dari upaya-upaya ini adalah:

pertama perlunya lembaga akuntabilitas pendidikan nasional yang bertugas untuk: (1) memper-barukan dan mengikuti perkembangan pendidikan bangsa-bangsa lain, sehingga pendidikan nasional memiliki daya tarik internasional; (2) menentukan arah, tujuan dan hasil-hasil pembangunan pendidikan jangka menengah yang ingin dicapai; (3) menentukan kriteria pendidikan nasional yang berorientasi pada dimutakhirkan perubahan standar internasional;

kedua, mengembangkan model-model pengelolaan pendidikan (*educational management*) yang mempertimbangkan diversifikasi pendidikan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan pembangunan yang beragam;

ketiga, mengembangkan gagasan-gagasan pembanguaan pendidikan yang diturunkan dari prioritas kebijakan pembangunan nasional, yang melibatkan kepentingan-kepentingan inter-sektoral dan inter-disiplin;

keempat, Mengembangkan panduan KBM yang lebih ditekankan pada pengembangan dan pembinaan kreatif serta kreativitas siswa;

kelima, Mengembangkan dan membina program-program peningkatan mutu pendidikan yang berorientasi berorientasi pada materi kurikulum dan mutu serta standar penilaian yang secara internasional dapat dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia.

PENUTUP

Dalam melakukan kajian dasar mengenai permasalahan kependidikan di tengah masyarakat, secara garis besar dasar-dasar yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Masyarakat tidak ada dengan sendirinya. Masyarakat adalah ekstensi yang hidup, dinamis, dan selak berkebang.
- 2) Masyarakat bergantung pada upaya setiap individu untuk memenuhi kebutuhan melalui hubungan dengan individu lain yang berupaya memenuhi kebutuhan.
- 3) Individu-individu, di dalam berinteraksi dan berupaya bersama guna memenuhi kebutuhan, melakukan penemuan terhadap upaya tersebut dengan jalan apa yang disebut *interpersonal*.
- 4) Setiap masyarakat bertanggung jawab atas pembentukan pola tingkah laku atau individu dan komunitas yang membentuk masyarakat.
- 5) Pertumbuhan individu di dalam komunitas, ketahanan dengannya, dan perkembangannya di dalam lingkup yang memastikannya untuk bertanggung jawab terhadap lingkungannya.

Bila penjelasan di atas ditarik di dalam dunia pendidikan, maka masyarakat sangat besar peran dan pengaruhnya terhadap perkembangan intelektual dan keprabdian individu peserta didik. Untuk itu, setiap anggota masyarakat memiliki peranan dan tanggung jawab moral terhadap terlaksananya proses pendidikan. Hal ini disebabkan adanya hubungan timbal balik antara masyarakat dan pendidikan. Dalam upaya memberdayakan masyarakat dalam dunia pendidikan merupakan satu hal penting untuk kemajuan pendidikan. Salah satunya melalui Pendidikan multikultural yang didasarkan pada gagasan keadilan sosial dan persamaan hak dalam pendidikan. Sedangkan dalam doktrin Islam

sebenarnya tidak membedakan etnik, ras dan lain sebagainya dalam pendidikan. Manusia semuanya adalah sama, yang membedakannya adalah ketakwaan mereka kepada Allah Swt. Dalam Islam, pendidikan multikultural mencerminkan bagaimana tingginya

penghargaan Islam terhadap ilmu pengetahuan dan tidak ada perbedaan di antara manusia dalam bidang ilmu.

DAFTAR PUSTAKA

- Rohmat Mulyana, 2006. *Multikulturalisme dan Nilai Agama*. Jurnal pendidikan
- Supriatn, 1999. *Kewajirannya Amerika: Dari Akomodasi Budaya ke Multikulturalisme*. *Jurnal Studi Amerika*, vol. 5 Agustus, hal. 33-42.
- _____, 2001a, "Bhinneka Tunggal Ika: Keberagaman Suku Bangsa atau Kebudayaan?" makalah disampaikan dalam Seminar
- _____, 2001b, "Indonesia Baru Dalam Perspektif Multikulturalisme". *Harian Media Indonesia*, 10 Desember 2001.
- _____, 2002. *Kemutamaan Warga dan Hak Budaya Komunitas dalam Masyarakat Majemuk Indonesia*. *Jurnal Antropologi Indonesia* nomor 6
- Tilak, H. A. R., 2002. *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pergantian Pedagogi Transformatif untuk Indonesia*. Jakarta: Grafindo

WWW.Pendidikan.Network/Artikel/Mei/2004

